

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Aspandi, 2002, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, LEKSHI Mediatama, Surabaya.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dariyo, Agoes 2008, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Lynskey, Orla, 2014, *Deconstructing Data Protection: the 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order*", *International and Comparative Law Quarterly*, London.
- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mandica-Nur, Notrida G.B., 2009, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, Penerbit IRDI-Kemenkominfo-USAID-DRSP, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nggilu, Novendri, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

- Mustofa, Syahrul, 2020, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Guepedia, Bogor.
- Nugraha, Safni, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nurtjahjo, Hendra, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Nggilu, Novendri, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jambi.
- Saputra, Andi Muh Akbar, Lalu Puji Indra Kharisma, Ahmad Ashril Rizal, Muhammad Ikhwan Burhan, and Ni Wayan Purnawati, 2023, *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Setiadi, Budi Arie, 2024, *Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030: Gagasan, Kebijakan, dan Strategi*, Publikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Sitompul, Josua, 2014, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tatanusa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumaritas, Suwandi, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syahrani, Riduan, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- T. O. Ihromi, 2004, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Westin, Alan, 1967, *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam*, Privacy and Freedom, London.

## **Jurnal**

Ady, Eka Nadia Septiani, Faiza Batrisya Nisrina, Fidyah Ramadhani, and Ferry Irawan. “Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce”. *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, No. 1, 2022, Program Pascasarjana Universitas BSI, Bandung: hlm. 45-55.

Alfi Syahr, Zulfia Hanum, “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora”. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, No. 2, 2020, Jakarta: hlm. 1-2.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi”. *Jurnal Hukum Peratun*, 2018, Banjarmasin: hlm. 265-286.

Del Piero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisa Muthmainnah. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Kasus Kebocoran Data”. *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: hlm. 9-10.

Erna, P. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”. *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang: hlm. 1-27.

Fikri, Muhammad, and Abdurrakhman Alhakim. “Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia”. *Yustisi Jurnal Hukum*, 9, No. 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam: hlm. 9-11.

Giorgio Pino, “The Right to Personal Identity in Italian Private Law: Constitutional Interpretation and Judge-Made Rights”. *The Harmonization of Private Law in Europe*, 2022, Europe: hlm. 110-133.

Herryani, Mas Rara Tri Retno, and Harsono Njoto. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen *Online Marketplace*”. *Transparansi Hukum* 5, No. 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Kediri: hlm 110-133.

- Indriyani, *et al.*, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System”. *Justitia Jurnal Hukum*, 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya: hlm. 203-206.
- Liza Fariyah. “Manajemen Pengetahuan di Sektor Pengadilan”. *Jurnal Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan*, No. 1, 2016, LEIP, Jakarta: hlm. 35-65.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan”. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, No. 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan, Medan: hlm. 35-65.
- Negara, Arumbela Bangun, Oskar S. Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. “Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, No. 5, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Palu: hlm. 248-255.
- Riyadi, Gillang Achmad, dan Toto Tohir Soeriaatmadja. “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung: hlm. 226-231.
- Rohendi, Acep. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional”. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, 2015, Fakultas Hukum Universitas Bina Sarana Informatika, Bandung: hlm. 474-488.
- Wijayanta, Tata. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni, 2010, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: hlm. 330-346.

### **Skripsi/Penulisan Hukum**

- Fajar Muhammad Djuanda, 2019, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Perlindungan Data Pengguna Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Penulisan Hukum*, Tidak dipublikasikan, Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mala, Dewi. 2023, Pertanggungjawaban Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan, *Penulisan Hukum*, Tidak dipublikasikan, Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, *Penulisan Hukum*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## Internet

Adji Prakoso, “Meneliti Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi, Tim Pustrajak MA RI Kunjungi Pengadilan Tinggi Surabaya”, [03/06/2025]: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/meneliti-keterbukaan-informasi-dan-perlindungan-data-pribadi-0j2> [04/06/2025].

Asep Nursobah, “Diresmikan Ketua MA, Direktori Putusan Bertransformasi menjadi Pusat Informasi Hukum”, [22/08/2024]: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1691-diresmikan-ketua-ma-direktori-putusan-bertransformasi-menjadi-pusat-informasi-hukum> [06/11/2024].

HAG, “Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang”, [2/02/2015]: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-tertutup-bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang-1t54cef128994d1/?page=1> [06/04/2024].

Ian Dwi Heruyanto, Dian Mustika Intan, “Mengenal Maladministrasi”, [1/03/2021]: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi> [06/04/2025].

Lisa Hoffman, “What Is Sensitive Data & How Is It Different to Personal Data? Pridatect”, [21/01/2021]: <https://www.pridatect.co.uk/differences-between-personal-data-and-sensible-data-for-gdprpurposes/>, [10/12/2024].

Nafiatul Munawaroh, “Apa itu Maladministrasi dan Bentuk-Bentuknya”, [30/05/2024]: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-maladministrasi-dan-bentuk-bentuknya-1t58292617134da/> [19/05/2025].

Tenri Gobel, “Data Pribadi di Putusan Perkara Perceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM” [24/08/2020]: <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti%20Problem-SDM>, [15/05/2025].

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1848 - 23).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem  
dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang  
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JS Perihal Perceraian  
oleh RY selaku Penggugat melawan TR selaku Tergugat dalam Perkara  
Cerai Gugat.

## **Wawancara**

Abdul Aziz, 2025, Eksposur Data Putusan Perceraian sebagai Implikasi  
Teknologi Informasi di dalam Reformasi Sistem Peradilan Perdata di  
era Hukum Digital, *Wawancara*, Yogyakarta, 18 Maret.

Jaka Mirdinata, 2025, Eksposur Data Putusan Perceraian sebagai Implikasi  
Teknologi Informasi di dalam Reformasi Sistem Peradilan Perdata di  
era Hukum Digital, *Wawancara*, Yogyakarta, 17 Juni.